

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudiin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

A. Pangerang dan S. Anugrah, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Jakarta : Grafindo

HR Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Isnina, Zainuddin, Muhammad Arifin, Abdul Hakim Siagian, Tengku Erwinsyahbana, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*: umsu press. hlm. 33. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=jcFLEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&dq=info:nUMZxGIsRuAJ:scholar.google.com&ots=SckyY9D7KO&sig=tc-lbmdSKcJwPn2pYqLsbwKuq0w&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Juniarso Ridwan, et al, 2014, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*, Bandung : Nuansa Cendekia

Jimly Asshiddiqie, 2013, *Komentor Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika

Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A Social Science Perspective)*, Bandung: (M.Khozim, Pentj) Nusa Media, 2009.

Mukti Fajar ND., Yulianto Achmad, M.H. 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan & Jabatan*, Jakarta : Sinar Grafika,

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.

Soerjono Soekanto, 2022, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.

Soerjono Soekanto, 2019, *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*, Bandung: Penerbit Remadja Karya CV Bandung

Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembinaan*, Jakarta : Grasindo

Philippus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika

Petrus Soerjowinoto, et al, 2014, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata.

Jurnal Ilmiah/ Skripsi/ Thesis/ Disertasi

Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk berbagai Kegiatan*. Makalah tidak dipublikasikan.

- Abdul, Haris. 2017, “Implementasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekan Bar (Studi di Unit Pelayanan Teknis Pendapatan Kecamatan Tampan). Undergraduate thesis, Ilmu Pemerintahan
<https://repository.uir.ac.id/449/>.
- Anwar M. Roem, 2017, “Peran Dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Untuk Menarik Investasi Asing Di Provinsi Papua”. Universitas YAPIS Papua.
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/57481>
- Bagir Manan, 1995, “Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau Sari Perspektif UUD, makalah tidak dipublikasikan.
- Dayantri, 2022, “Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara”. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
<https://publish.ojs-indonesia.com/index.php/SIBATIK/article/view/69>
- Fai, 2021, “Apa Itu Hukum Adat”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. <https://umsu.ac.id/en/apa-itu-hukum-adat/>
- Febrian, 2004. *Hierarki Aturan Hukum Di Indonesia*. Disertasi, Universitas Airlangga Surabaya. hlm. 284.
<https://repository.unair.ac.id/32460/>
- Jl Wibowati, 2020, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Muarakati Baru Satu Palembang”. Jurnal Manajemen, [Jurnal.unpal,.ac.id](https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/jm/article/view/348).
<https://jurnal.unpal.ac.id/index.php/jm/article/view/348>
- Kahar Haerah, 2014, “Pengantar Ilmu Pemerintahan.” Repository, Universitas Muhammadiyah Jember

<http://repository.unmuhjember.ac.id/9490/>

Khelen Christine, 2019, “Kewenangan BKPM Dalam Perizinan Investasi Pasca Kebijakan *Online Single Submission* Di Kota Batam.” Universitas Internasional Batam.

<https://repository.uib.ac.id/1463/4/s-1551096-chapter1.pdf>

Lis Julianti, 2021, “*Kajian Yuridis Terkait Pengembangan Iklim Investasi Indonesia Di Era Pandemi COVID-19.*” Jurnal Aktual Justice.

<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/aktualjustice/article/view/619>

Marhaendra Wija Atmaja, 2016, “Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan”. Risalah Bahan Kuliah Hukum Perundang-Undangan. Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/3c793d0bcf6357d276a26d1ffd2185d8.pdf

Muslimin B Putra, 2020, “Mengenal Pelayanan Publik”, OMBUDSMAN.

<https://ombudsman.go.id/artikel/artikel-mengenal-pelayanan-publik>

Manovri Yeni, et al, 2021, “Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh”. Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Aceh (UNMUHA), Program Studi Ekonomi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Serambi Mekkah.

<https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI/article/view/107>

Priskila Kurniawati, 2020, “Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP di Kota Semarang).” Universitas Katholik Soegijapranata Semarang.

<https://repository.unika.ac.id/24748/>

Ripaldi, et al, 2019, “*Kajian Yuridis Terhadap Peberian Izin Reklamasi Teluk Jakarta.*” Undergraduate, Universitas Muhammadiyah Jember. <http://repository.unmuhjember.ac.id/5926/>

Sjachran Basah, 1992, “*Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi*”. Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair Surabaya
<https://repository.unair.ac.id/32689/21/9.%20DAFTAR%20BACA%20AN.pdf>

Syarifuddin, et al, 2017, “*Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Uang Pengganti Perkara Tindak Pidana Korupsi*”. Other thesis, Untag Surabaya.
<http://repository.untag-sby.ac.id/view/subjects/K1.html>

Safrizal Hidayat, 2019, “*Peran Penyidik Pegawai Negara Sipil Dan Direktorat Polisi Air Dalam Mengangani Kasus Penangkapan Kepiting Yang Tidak Sesuai Ukuran Standar.*” Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/19809>

Studocu, 2022, “*Sumber Hukum Materiil dan Formal*”. Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-muhammadiyah-malang/pengantar-ilmu-hukum/sumber-hukum-materiil-dan-formal/34787381>

Toha Ma'sum, 2019, “*Perizinan Tempat Hiburan Di Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor. 16 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan Pada Badan Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal Dalam Mengawasi Penyimpangan Perizinan Tempat Hiburan Menurut Perspektif Hukum Islam*”. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
http://slims.uinsatu.ac.id/index.php?p=show_detail&id=22739

Y Suhardin, 2010, “*Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum*”. Jurnal Hukum & Pembangunan.
<http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/274>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39903/uu-no-25-tahun-2007>

Undang-Undang 17 Tahun 2007 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39830>

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>

Undang-Undang 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5311/pp-no-96-tahun-2012>

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122033/pp-no-72-tahun-2019>

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161835/pp-no-5-tahun-2021>

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/161836/pp-no-6-tahun-2021>

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Cipta Kerja

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/234926/perpu-no-2-tahun-2022>

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/168901/peraturan-bkpm-no-3-tahun-2021>

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/168903/peraturan-bkpm-no-4-tahun-2021>

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 mengenai Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/169019/peraturan-bkpm-no-5-tahun-2021>

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/224046/perda-prov-jawa-tengah-no-9-tahun-2008>

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Perizinan Dan Non Perizinan

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/274546/perda-kota-semarang-no-8-tahun-2014>

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/27518>

Peraturan Daerah Provinsi Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/27684>

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/277919/perda-kota-semarang-no-8-tahun-2023>

Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/229072/perwali-kota-semarang-no-88-tahun-2021>

Peraturan Walikota Semarang Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

<https://jdih.semarangkota.go.id/dokumen/view/peraturan-walikota-semarang-nomor-109-tahun-2021-tentang-kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-sistem-kerja-dinas-penanaman-modal-dan-pelayanan-terpadu-satu-pintu-kota-semarang-1314>

Peraturan Walikota Semarang Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 88 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/217761/perwali-kota-semarang-no-43-tahun-2022>

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/240988/permendagri-no-120-tahun-2018>

Peraturan Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementrian Pendayaguna Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/170614/permen-pan-rb-no-19-tahun-2021>

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003 mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

<https://peraturan.bpk.go.id/Download/141646/PERMENPAN%20NOMOR%207%20TAHUN%202010.pdf>

Internet / Website

Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2023, Kota Semarang Dalam Angka
(*Semarang Municipality in Figures*) 2023, BPS Kota Semarang

<https://dp3a.semarangkota.go.id/storage/app/media/Kota%20Semarang%20Dalam%20Angka%202023.pdf>

Danny Saputra-Bisnis.com, Penerapan OSS-RBA Tumpang Tindih, KPPOD: Ada Potensi Ego Sektoral, 14:53, Selasa, 23 November 2021.

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20211123/9/1469401/penerapan-oss-rba-tumpang-tindih-kppod-ada-potensi-ego-sektoral>

Dewan Perwakilan Rakyat Komisi IX, Kurniasih Nilai Perppu Cipta Kerja Inkosisten Dengan Putusan MK, 2 Januari 2023.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/42628/t/Kurniasih+Nilai+Perppu+Cipta+Kerja+Inkonsisten+Dengan+Putusan+MK>

Depatemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1989,

<https://opac.perpusnas.go.id/Detailopac.aspx?Id=24761>

Eka Yulianti Fajlin, Pemkot Semarang Mulai Hapus IMB Diganti PBG, Ini Perbedaannya, 21:00, Senin, 04 April 2022.

<https://jateng.tribunnews.com/2022/04/04/pemkot-semarang-mulai-hapus-imb-diganti-pbg-ini-perbedaannya>

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah, KPPOD: Ratusan Perda Menghambat Investasi, 20 November 2019.

<https://www.kppod.org/berita/view?id=734>

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, KPPIP Percepat Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak, 29 September 2021.

<https://kppip.go.id/berita/kppip-percepat-pembangunan-jalan-tol-semarang-demak/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<https://kbbi.web.id/wenang>

Kementrian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal

<https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files/Infografis%20Perizinan%20Berusaha%20Berbasis%20Risiko.pdf>

LAMPIRAN

Nama : Siti Ariawati, S.E., M.M.

Jabatan : Sub-Koordinasi, Monitoring, Evaluasi DPMPTSP

Hari/tanggal : Selasa, 11 Juni 2024

Jam : 08:07

1. Apakah Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota Semarang dalam hal ini mengatur mengenai perizinan berusaha mengalami perubahan seiring adanya perubahan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021?

Jawaban :

Masih berlaku, jadi kami ada Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang dan terdapat 1233 perizinan yang diatur didalamnya, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang masih membuat Peraturan Daerah Tentang Perizinan Berusaha yang ada di Kota Semarang